

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : ILDA AZILLA SIREGAR
NPM : 1605170378
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

- Nama : ILDA AZILLA SIREGAR
NPM : 1605170378
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si)

PENGUJI II

(SURYA SANJAYA, SE., MM)

Pembimbing

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ILDA AZILLA SIREGAR
N.P.M : 1605170378
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI
KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
TEBING TINGGI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 17 November 2020

Pembimbing Skripsi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ilda Azilla Siregar
NPM : 1605170378
Dosen Pembimbing : Fitriani Saragih, SE, M.Si

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Rasio Keuangan
Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Identifikasi masalah disesuaikan dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah diperjelas lagi fenomenanya.	31 Oktober 2020 4 November 2020	
Bab 2	Perbaiki kerangka konseptual.	31 Oktober 2020	
Bab 3	Waktu penelitian disesuaikan dengan yang sebenarnya.	31 Oktober 2020	
Bab 4	Tambahkan data tahun 2019	31 Oktober 2020	
Bab 5	Kesimpulan disesuaikan dengan pembahasan.	31 Oktober 2020	
Daftar Pustaka	Sesuaikan dengan mandeley	4 November 2020	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc sidang	4 November 2020	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 17 November 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Ilda Azilla Siregar
NPM : 1605170378
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi / Perpajakan / Manajemen /
Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti siding meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 17 November 2020

Pembuat Pernyataan

 **ILDA AZILLA SIREGAR**

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat Pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

ILDA AZILLA SIREGAR
1605170378

ildaregar@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran, dan teknik analisis data yang digunakan dengan mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Laporan Realisasi Anggaran, menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan indikator yang sesuai dengan teori, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi bergantung dengan pemerintah pusat, sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut, dan untuk rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya, untuk rasio keserasian dikatakan buruk karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil, dana pemerintah daerah yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF FINANCIAL RATIOS IN ASSESSING THE REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT OF TEBING TINGGI CITY

ILDA AZILLA SIREGAR
1605170378

[*ildaregar@gmail.com*](mailto:ildaregar@gmail.com)

The problem in this research is the dependence of local governments on subsidies from the central government which is reflected in the amount of central government assistance from the point of view of routine budgets, the low ability of regions to explore potential PAD sources as reflected in the relatively small revenue of Regional Original Revenue (PAD) compared to total regional revenue, lack of effort and the ability of regional revenue to manage and explore existing revenue sources, the inefficiency of local governments in conducting regional spending. The purpose of this study is to determine and analyze the financial performance of Tebing Tinggi City Government when viewed from the Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Conformity Ratio, and Growth Ratio.

This type of research is quantitative descriptive, data collection techniques using documentation studies in the form of budget realization reports, and data analysis techniques used by collecting research data in the form of Budget Realization Reports, calculating the financial performance of Tebing Tinggi City Government, analyzing and discussing the financial performance of the City Government. Tebing Tinggi with indicators in accordance with the theory, and drawing conclusions. The results of this study conclude that the independence ratio which is still very low occurs due to the inability of the Tebing Tinggi City Government to increase Regional Original Revenue, which causes the Tebing Tinggi City Government to depend on the central government, while the effectiveness ratio of PAD is said to be good because the Tebing Tinggi City Government able to achieve the target for the region's own revenue, and for the efficiency ratio it is said to be bad because the Tebing Tinggi City Government has not been able to reduce the amount of regional expenditure, for the harmony ratio it is said to be bad because the expenditure of funds made by the Regional Government of Tebing Tinggi City is most of the funds owned still prioritized for operating expenditure needs so that the capital expenditure ratio is relatively small, regional government funds are more inclined towards routine expenditures for monitoring government activities and have not paid attention to regional development, and for the rate of growth ratio is negative, because the value of total regional revenue, original local revenue, and operational expenditures is getting higher while the value of capital expenditures is getting lower.

Keywords: Financial Performance, Regional Financial Ratios

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun proposal ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi”.

Dalam menulis proposal ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Akbar Ismael Siregar** dan Ibu **Syafrida Hanum Harahap** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.

10. Buat seluruh keluarga dan saudara yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan proposal ini.

11. Buat teman-teman saya Nisa, Ayu, Nunung, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan proposal.

Akhir kata semoga kiranya proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Medan, 22 November 2020

Penulis



HILDA AZILLA SIREGAR
NPM. 1605170378

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Rumusan Penelitian	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah	11
2.1.2 Rasio Keuangan Daerah	20
2.2 Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Defenisi Operasional	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Deskripsi Data	38
4.1.2 Analisis Data	39
4.2 Pembahasan	47
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur APBD Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4
Tabel 2.1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	24
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	27
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019.....	40
Tabel 4.2	Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019	41
Tabel 4.3	Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019.....	42
Tabel 4.4	Penghitungan Rasio Belanja Operasi BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019	44
Tabel 4.5	Penghitungan Rasio Belanja Modal BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019	45
Tabel 4.6	Penghitungan Rasio Pertumbuhan BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas tidak sekedar menunjukkan kemampuan lembaga sektor publik dalam penggunaan uang publik, tetapi juga menunjukkan kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Indrayani & Khairunnisa, 2018).

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut (Rahayu, 2016).

Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang persentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki potensi PAD yang cukup kecil dikarenakan wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dengan adanya sistem desentralisasi Kota Tebing Tinggi harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Berikut adalah gambaran perkembangan APBD Pemerintahan Kota Tebing Tinggi selama enam tahun anggaran :

Tabel 1.1 Struktur APBD Pemerintah Kota Tebing Tinggi

STRUKTUR APBD	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan	628.621.517.914,97	667.061.086.952,21	707.957.368.508,40	711.630.009.618,17	717.784.276.096,71	713.313.296.387,52
PAD	74.515.273.851,97	82.410.053.810,21	94.058.491.717,40	113.222.874.687,17	114.048.354.142,71	105.239.918.351,52
Dana Perimbangan	436.868.476.540,00	462.561.984.813,00	557.996.175.287,00	566.917.829.684,00	540.901.919.396,00	547.285.111.940,00
Lain-lain pendapatan yang sah	117.237.767.523,00	122.089.048.329,00	55.902.701.504,00	31.489.305.247,00	62.834.002.558,00	60.788.266.096,00
Belanja	614.015.440.542,58	666.789.251.487,93	760.702.935.123,17	699.043.052.154,00	746.857.086.076,33	691.772.850.871,40
Belanja Aparatur/Tidak Langsung	290.198.557.297,00	316.302.879.327,00	345.647.149.563,00	285.831.657.947,00	283.929.247.886,00	287.964.253.104,00
Belanja Publik/Langsung	323.816.883.245,58	350.486.372.160,93	415.055.785.560,17	413.211.394.207,00	462.927.838.190,33	403.808.597.767,40
Surplus/Defisit	14.606.077.372,39	271.835.464,28	52.745.566.614,77	12.586.957.464,17	29.072.809.979,62	21.540.445.516,12
Penerimaan Pembiayaan Daerah	64.028.560.309,33	71.143.082.781,72	71.434.253.646,00	13.868.964.197,23	65.529.140.025,40	31.596.840.087,88
SILPA	64.025.678.209,33	71.134.637.681,72	71.414.918.246,00	13.868.964.197,23	26.226.140.025,40	31.596.840.087,88
Penerimaan Piutang Daerah	2.882.100,00	8.445.100,00	19.335.400,00	-	39.303.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500.000.000,00	-	4.819.722.834,00	-	4.816.865.557,00	21.182.670.303,00
Penyertaan Modal Pemda	7.500.000.000,00	-	4.819.722.834,00	-	4.816.865.557,00	9.391.770.303,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	71.134.637.681,72	71.414.918.246,00	13.868.964.197,23	26.455.921.661,40	31.639.464.488,78	31.954.615.301,00

Sumber: BPKPAD data diolah (2020)

Dari gambaran struktur APBD di atas, menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya (PAD). Ini menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali sumber asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa belanja rutin (operasi) masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (pembangunan). Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerahnya.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat ditunjukkan melalui kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah yakni masing-masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada di daerahnya dengan menggali sumber asli daerah (Astuti & Mimba, 2016).

Menurut Lubis & Hafni (2017) salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ditetapkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sari *et al* (2020) dana perimbangan atau dana transfer memiliki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efisiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa publik, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD Terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat (Sari *et al*, 2020).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari Pempus. Dana Perimbangan itu

sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan Lain PAD yang sah.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Sari *et al*, 2020).

Menurut Antari dan Sedana (2018), infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sektor, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul : **“Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kota Tebing Tinggi lebih besar diperoleh dari dana perimbangan dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
4. Masih tingginya belanja operasi daripada belanja modal daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Keserasian.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya berikut ini :

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan tentang analisis kinerja keuangan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

2. Bagi Pemerintahan Kota Tebing Tinggi

Dari hasil penelitian merupakan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar laporan keuangan di tahun berikutnya lebih baik lagi.

3. Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan teori mengenai pengukuran kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut kamus akuntansi manajemen, “kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.”

Kemudian menurut Lubis & Hafni (2017) “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran

daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah atas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi (Fathah, 2017).

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2018). Menurut Pilat & Morasa (2017) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.”

Menurut Sijabat, Saleh & Wachid (2013) “Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Sedangkan menurut Ardila & Putri (2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah hasil pencapaian yang diperoleh dari kegiatan yang telah direncanakan yang diukur dengan

menggunakan indikator keuangan bertujuan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

b. Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Lubis & Hafni, 2017).

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Sinambela, Saragih & Sari (2018) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum, tujuan penilaian kinerja adalah menurut Pramono (2014):

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

c. Manfaat Kinerja Keuangan Daerah

Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Dewi (2018) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu.

Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulanusulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas.

Untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka.

d. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Dewi, Dharmawan & Werastuti (2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, antara lain :

1. Partisipasi penyusunan anggaran.
2. Kualitas sumber daya manusia.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah.
4. Pengawasan fungsional.
5. Penerapan sistem informasi akuntansi.

Sedangkan menurut Ridwan & Mus'id (2019) Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik, antara lain :

1. Tujuan yang jelas dan terukur.
2. Motivasi kerja.
3. Sistem pengukuran kinerja.
4. Insentif desentralisasi.
5. Partisipasi dalam penyusunan anggaran.

e. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sinambela & Pohan (2016) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) indikator kinerja keuangan daerah meliputi:

1. Indikator Masukan, misalnya:
 - 1) Jumlah dana yang dibutuhkan.
 - 2) Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - 3) Jumlah infrastruktur yang ada.
 - 4) Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator Proses, misalnya:
 - 1) Ketaatan pada peraturan perundangan.
 - 2) Rata-rata yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluaran, misalnya:
 - 1) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - 2) Ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil, misalnya:
 - 1) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.
 - 2) Produktivitas para karyawan atau pegawai.

5. Indikator manfaat, misalnya:

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat.
- 2) Tingkat partisipasi masyarakat.

6. Indikator *impact*, misalnya:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat.

Menurut Sumual, Kalangi & Gerunggai (2017) terdapat 7 indikator kinerja:

1. Tujuan

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama atasan atau bawahan.

3. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi

terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4. Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

5. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

6. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.

7. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia.

2.1.2 Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Menurut Fathah (2017) salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Alat rasio keuangan adalah analisis rasio keuangan yang diukur berdasarkan data keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Lubis & Hafni, 2017).

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dimana hasil analisa rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam (Utomo, 2011):

- a. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Pramono (2014) Bentuk dari analisis rasio keuangan adalah analisis aset, yang dapat diartikan :

- a. Membandingkan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode pelaporan).
- b. Menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok aset dengan total aset.
- c. Menghitung modal kerja (*working capital*) yang dimiliki pemerintah daerah.
- d. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset.
- e. Mengevaluasi hasil penghitungan, interpretasi dan prediksi.

Sedangkan menurut Pramono (2014) bentuk dari analisis aset meliputi :

- a. Analisis pertumbuhan.
- b. Analisis proporsi.
- c. Analisis modal kerja.

d. Analisis rasio :

- 1) Rasio likuiditas.
- 2) Rasio Solvabilitas.
- 3) Rasio *leverage*

Menurut Pramono (2014) Tujuan dari masing-masing rasio keuangan adalah :

- a. Analisis pertumbuhan yaitu melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca dengan tujuan untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua periode berurutan.
- b. Analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar .
- c. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.

d. Analisis rasio :

- 1) Rasio likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utang yang jatuh tempo.

2) Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Fathah, 2017). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Fathah (2017)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Fathah, 2017). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017), adalah:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Fathah (2017) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik.

Meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Susanti, Raharjo & Oemar, 2017). Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Fathah (2017)

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Susanti, Raharjo & Oemar, 2017). Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

- 1) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%

Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Fathah, 2017). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Fathah, 2017). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk rasio keserasian belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Pramono, 2014). Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan)

yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Fathah, 2017). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Susanti, Raharjo & Oemar, 2017). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Fathah

(2017). Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah (Pramono, 2014):

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2) Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.2 Kerangka Konseptual

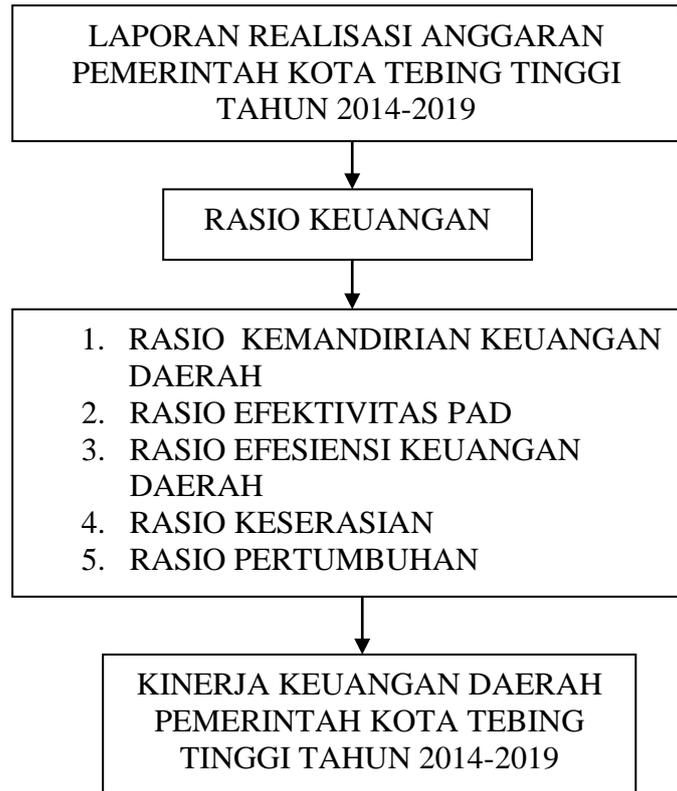
Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Utomo, 2011).

Dalam Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Lubis & Hafni (2017) “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Dengan melihat hasil analisis tersebut dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan di Kota Tebing Tinggi. Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yakni peneliti mendatangi objek penelitian secara langsung guna memperoleh data-data maupun informasi yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Menurut Sijabat, Saleh & Wachid (2013) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD), yaitu :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Walikota Tebing Tinggi di bagian akuntansi, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Jln. Dr. Sutomo, Rambung, Kec. Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20616.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Maret sampai dengan Juli 2020. Adapun rencana penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Prariset	18-12 Desember 2019
2	Pengajuan Judul	13-17 Desember 2019
3	Penulisan Proposal	18 Desember 2019-18 Maret 2020
4	Revisi	19 Maret-18 Juli 2020
5	Seminar Proposal	21 Juli 2020
6	Penulisan Skripsi	22 Juli-17 Oktober 2020
7	Bimbingan Skripsi	18 Oktober-3 November 2020
8	Sidang Meja Hijau	10 November 2020

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2014-2019.

Penelitian ini menggunakan data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2014-2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2014-2019 yang diperlukan oleh peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2014-2019.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan mengukur rasio: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.
3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan indikator yang sesuai dengan teori.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Kota Tebing Tinggi adalah salah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan berjarak sekitar 78 km dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi berada di bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai yang dibatasi oleh PTPN III Rambutan di sebelah utara, PT. Sucofindo Kebun Tanah Besih di sebelah timur, PTPN III Kebun Pabatu di sebelah selatan, dan PTPN III Kebun Gunung Pamela Bandar Bejambu di sebelah barat. Ketinggian Kota Tebing Tinggi berada pada kisaran 18-34 mdpl. Secara administratif, Kota Tebing Tinggi terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Bajenis, dan Kecamatan Padang Hilir.

Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi pada tahun 2016 yaitu 158.902 jiwa yang terdiri dari 78.582 jiwa penduduk laki-laki dan 80.320 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kota Tebing Tinggi tahun 2016 mencapai 4.130 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan kepadatan sebesar 7.220 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terletak di Kecamatan Padang Hilir dengan kepadatan sebesar 2.870 jiwa/km². Komposisi penduduk Kota Tebing Tinggi didominasi oleh penduduk muda/dewasa dengan

persentase penduduk usia produktif mencapai 66,78% total jumlah penduduk.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 Kota Tebing Tinggi termasuk ke dalam lokasi prioritas yang diarahkan sebagai Sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) yang berorientasi mendorong potensi produksi pertanian dengan cara meningkatkan spesialisasi fungsi sektor pertanian dan perdagangan.

4.1.2 Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2014-2019. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tebing Tinggi. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian diukur dengan :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2014	74.515.273.851,97	436.868.476.540,00	17,06	Instruktif
2015	82.410.053.810,21	462.561.984.813,00	17,82	Instruktif
2016	94.058.491.717,40	557.996.175.287,00	16,86	Instruktif
2017	113.222.874.687,17	566.917.829.684,00	19,97	Instruktif
2018	114.048.354.142,71	540.901.919.396,00	21,08	Instruktif
2019	105.239.918.351,52	547.285.111.940,00	19,23	Instruktif

Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)

Dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.1 di atas, kemandirian keuangan BPKPAD Kota Tebing Tinggi tergolong masih sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,86% dan

nilai tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 21,08%. Tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2014, 2015, 2017, dan 2019 masing-masing sebesar: 17,06%, 17,82%, 19,97%, dan 19,23%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi terhadap bantuan dari pusat masih sangat tinggi.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2014	74.515.273.851,97	65.945.890.342,00	112,99	Efektif
2015	82.410.053.810,21	79.551.848.210,00	103,59	Efektif
2016	94.058.491.717,40	96.675.127.242,00	97,29	Tidak Efektif
2017	113.222.874.687,17	121.548.410.113,00	93,15	Tidak Efektif
2018	114.048.354.142,71	105.579.950.493,00	108,02	Efektif
2019	105.239.918.351,52	119.116.990.780,10	88,35	Tidak Efektif

Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas PAD BPKPAD Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014 dan 2015 tergolong efektif yaitu sebesar 112,99% dan 103,59% karena sudah di atas 100%. Tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 97,29% dan 93,15% yang termasuk dalam kategori

tidak efektif karena berada di bawah 100%. Kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 108,02% dan termasuk dalam kategori efektif karena sudah di atas 100%. Tahun 2019 mengalami penurunan kembali dan merupakan nilai terendah yaitu sebesar 88,35% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada di bawah 100%.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKPAD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014-2019

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2014	614.015.440.542,58	628.621.517.914,97	97,68	Efisien
2015	666.789.251.487,93	667.061.086.952,21	99,96	Efisien
2016	760.702.935.123,17	707.957.368.508,40	107,45	Tidak Efisien
2017	699.043.052.154,00	711.630.009.618,17	98,23	Efisien
2018	746.857.086.076,33	717.784.276.096,71	104,05	Tidak Efisien
2019	691.772.850.871,40	713.313.296.387,52	96,98	Efisien

Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)

Dapat dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.3 di atas bahwa efisiensi keuangan BPKPAD Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 97,68% dan 99,96% termasuk dalam kategori efisien karena berada di bawah 100%. Mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar 107,45% termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada di atas 100%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar 98,23% termasuk dalam kategori efisien karena berada di bawah 100%. Dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 104,05% termasuk dalam kategori tidak efisien karena berada di atas 100%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 96,98% yang merupakan nilai tertinggi atau yang paling efisien diantara tahun lainnya karena berada di bawah 100%.

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Penghitungan Rasio Belanja Operasi BPKPAD Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2014-2019

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2014	450.433.316.497,58	614.015.440.542,58	73,36
2015	508.287.656.243,18	666.789.251.487,93	76,23
2016	557.181.221.083,17	760.702.935.123,17	73,25
2017	514.582.412.676,00	699.043.052.154,00	73,61
2018	543.306.946.643,62	746.857.086.076,33	72,75
2019	538.197.528.799,71	691.772.850.871,40	77,80

Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa Rasio Belanja Operasi BPKPAD Kota Tebing Tinggi tahun 2014 sebesar 73,36% dan tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 76,23%. Kemudian tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 73,25%, mengalami peningkatan kembali tahun 2017 menjadi 73,61%. Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 72,62% dan mengalami kenaikan sebesar 77,80% pada tahun 2019 yang merupakan nilai tertinggi diantara tahun lainnya.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.5 Penghitungan Rasio Belanja Modal BPKPAD Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2014-2019**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	163.582.124.045,00	614.015.440.542,58	26,64
2015	158.487.242.000,75	666.789.251.487,93	23,77
2016	203.355.262.407,00	760.702.935.123,17	26,73
2017	184.156.162.478,00	699.043.052.154,00	26,34
2018	203.340.069.232,71	746.857.086.076,33	27,23
2019	153.577.322.071,69	691.772.850.871,40	22,20

Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa Rasio Belanja Modal BPKPAD Kota Tebing Tinggi tahun 2014 sebesar 26,64% dan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 23,77%. Kemudian mengalami peningkatan tahun 2016 yaitu sebesar 26,73%, dan tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 26,34%. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 27,23% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 22,20% yang merupakan nilai terendah diantara tahun lainnya.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.6 Penghitungan Rasio Pertumbuhan BPKPAD Kota Tebing Tinggi
Tahun Anggaran 2014-2019**

Keterangan	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PAD	74.515.273.851,97	82.410.053.810,21	94.058.491.717,40	113.222.874.687,17	114.048.354.142,71	105.239.918.351,52	
Pertumbuhan PAD	-	10,59%	14,13%	20,37%	0,73%	-7,72%	7,62%
Pendapatan	628.621.517.914,97	667.061.086.952,21	707.957.368.508,40	711.630.009.618,17	717.784.276.096,71	713.313.296.387,52	
Pertumbuhan Pendapatan	-	6,11%	6,13%	0,52%	0,86%	-0,62%	2,60%
Belanja Operasi	450.433.316.497,58	508.287.656.243,18	557.181.221.083,17	514.582.412.676,00	542.398.350.143,62	538.197.528.799,71	
Pertumbuhan Belanja Operasi	-	12,84%	9,62%	-7,65%	5,41%	-0,77%	3,89%
Belanja Modal	163.582.124.045,00	158.487.242.000,75	203.355.262.407,00	184.156.162.478,00	203.340.069.232,71	153.577.322.071,69	
Pertumbuhan Belanja Modal	-	-3,11%	28,31%	-9,44%	10,42%	-24,47%	0,34%

Sumber : BPKPAD Kota Tebing Tinggi (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar -7,72%. Mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 20,37%. Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,60%. Belanja Operasi rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,89% dan pertumbuhan rata-rata Belanja Modal sebesar 0,34%.

4.2 Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diketahui jika realisasi PAD Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan kemudian turun di tahun 2019. Pada tahun 2014 PAD Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 74.515.273.851,97 atau sebesar 11,85% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu menjadi Rp 82.410.053.810,21 atau sebesar 12,35% dari total pendapatan. Pada tahun 2016 PAD Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan menjadi Rp 94.058.491.717,40 atau sebesar 13,29% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 113.222.874.687,17 atau sebesar 15,91% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 114.048.354.142,71 atau 15,89% dari total pendapatan. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 105.239.918.351,52 atau 14,75% dari total pendapatan.

Kemudian pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2018. Pada tahun 2014 sebesar Rp 436.868.476.540,00, kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 462.561.984.813,00. Pada tahun 2016 sebesar Rp 557.996.175.287,00 naik dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp 566.917.829.684,00 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 540.901.919.396,00 dan mengalami

peningkatan kembali pada tahun 2019 mejadi Rp 547.285.111.940,00. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kemampuan keuangan BPKPAD Kota Tebing Tinggi tergolong Rendah Sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Berawal pada tahun 2014 Rasio Kemandirian sebesar 17,06%, kemudian naik menjadi 17,82% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 Rasio Kemandirian turun sebesar 16,86% kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 19,97%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 21,08% dan turun kembali pada tahun 2019 sebesar 19,23%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2014 sampai tahun 2019 masih termasuk dalam kategori sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintahan pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam diantara 0% dan 25%.

Rasio kemandirian yang masih sangat rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Tebing Tinggi rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2018 ada penurunan anggaran. Pada tahun 2014 PAD dianggarkan sebesar Rp 65.945.890.342,00 atau 10,54% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2015 anggaran PAD dinaikkan menjadi Rp 79.551.848.210,00 atau 11,6% dari total

anggaran pendapatan. Pada tahun 2016 PAD dianggarkan sebesar Rp 96.675.127.242,00 atau 13,12% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2017 anggaran PAD dinaikkan menjadi Rp 121.548.410.113,00 atau 16,68% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2018 anggaran PAD diturunkan menjadi Rp 105.579.950.493,00 atau 14,99% dari total anggaran pendapatan dan anggaran PAD dinaikkan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 119.116.990.780,10 atau 15,93% dari total anggaran pendapatan.

Realisasi PAD Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan kemudian turun di tahun 2019. Pada tahun 2014 PAD Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 74.515.273.851,97 atau sebesar 11,85% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu menjadi Rp 82.410.053.810,21 atau sebesar 12,35% dari total pendapatan. Pada tahun 2016 PAD Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan menjadi Rp 94.058.491.717,40 atau sebesar 13,29% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 113.222.874.687,17 atau sebesar 15,91% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 114.048.354.142,71 atau 15,89% dari total pendapatan. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 105.239.918.351,52 atau 14,75% dari total pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKPAD Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014 sebesar 112,99%, tahun 2015 sebesar 103,59%, tahun 2016 sebesar 97,29%, tahun 2017 sebesar 93,15%, tahun 2018 sebesar 108,02%,

dan tahun 2019 sebesar 88,35%. Efektivitas kinerja keuangan Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2014, 2015, dan 2018 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Untuk tahun 2016, 2017, dan 2019 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Tebing Tinggi sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 100,57%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2016, 2017, dan 2019. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun

2019. Pada tahun 2014 pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 628.621.517.914,97, naik menjadi Rp 667.061.086.952,21 pada tahun 2015. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 707.957.368.508,40. Dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan lagi pendapatan daerah menjadi Rp 711.630.009.618,17, naik kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 717.784.276.096,71. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 713.313.296.387,52.

Total belanja daerah Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2014 total belanja daerah sebesar Rp 614.015.440.542,58. Mengalami kenaikan menjadi Rp 666.789.251.487,93 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 total belanja daerah sebesar Rp 760.702.935.123,17 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2017 turun menjadi Rp 699.043.052.154,00. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 746.857.086.076,33. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 691.772.850.871,40.

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga diketahui bahwa rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2014 sampai dengan 2019 sebesar 100,72% atau dapat dikatakan Tidak Efisien. Pada tahun 2014 Rasio Efisiensinya sebesar 97,68%, kemudian tahun 2015 naik menjadi 99,96%. Mengalami kenaikan tahun 2016 menjadi sebesar 107,45%, kemudian tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 98,23%. Tahun 2018 mengalami kenaikan

kembali menjadi sebesar 104,05% dan mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 96,98% di tahun 2019.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi tergolong Tidak Efisien karena rata-rata rasionya 100,72%. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

4. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa Realisasi Total belanja daerah Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2014 total belanja daerah sebesar Rp 614.015.440.542,58. Mengalami kenaikan menjadi Rp 666.789.251.487,93 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 total belanja daerah sebesar Rp 760.702.935.123,17 naik dari tahun sebelumnya, kemudian tahun 2017 turun menjadi Rp 699.043.052.154,00. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 746.857.086.076,33. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 691.772.850.871,40.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2014

sebesar Rp 450.433.316.497,58 dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi Rp 508.287.656.243,18. Kemudian naik kembali tahun 2016 sebesar Rp 557.181.221.083,17 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 514.582.412.676,00. Naik kembali pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 542.398.350.143,62 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi Rp 538.197.528.799,71.

Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Total Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2015, 2017, dan 2019 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari perhitungan Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2014 Rasio Belanja Operasinya sebesar 73,36% mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 76,23%, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 73,25%, dan pada tahun 2017 naik lagi menjadi 73,61%. Kemudian turun lagi pada tahun 2018 menjadi 72,62% dan naik lagi menjadi 77,80% di tahun 2019, sehingga rata-rata rasionya sebesar 74,50%. Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2014 sebesar 26,64% turun menjadi 23,77% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 26,73% dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 26,34%. Pada

tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 27,23% dan turun lagi menjadi 22,20% di tahun 2019, sehingga rata-rata rasionya sebesar 25,49%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Tebing Tinggi kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

5. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dan penurunan pada tahun 2019 di Kota Tebing Tinggi.

Pada tahun 2014 pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 628.621.517.914,97, naik menjadi Rp 667.061.086.952,21 pada tahun 2015. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 707.957.368.508,40 dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan lagi pendapatan daerahnya menjadi Rp 711.630.009.618,17. Kemudian naik kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 717.784.276.096,71 dan mengalami penurunan menjadi Rp 713.313.296.387,52 di tahun 2019.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun yang rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2015 tumbuh 6,11% dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2016 mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 6,13% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 sebesar 0,52%, tahun 2018 sebesar 0,86%, dan tahun 2019 mengalami penurunan yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain yaitu sebesar (0,62%).

Upaya pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.

Realisasi PAD Kota Tebing Tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan kemudian turun di tahun 2019. Pada tahun 2014 PAD Kota Tebing Tinggi sebesar Rp 74.515.273.851,97 atau sebesar 11,85% dari total pendapatan. Mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu

menjadi Rp 82.410.053.810,21 atau sebesar 12,35% dari total pendapatan. Pada tahun 2016 PAD Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan menjadi Rp 94.058.491.717,40 atau sebesar 13,29% dari total pendapatan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 113.222.874.687,17 atau sebesar 15,91% dari total pendapatan. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 114.048.354.142,71 atau 15,89% dari total pendapatan. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 105.239.918.351,52 atau 14,75% dari total pendapatan.

Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, PAD Kota Tebing Tinggi rata-rata mengalami peningkatan. Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar 7,62%. Berawal dari tahun 2015 yaitu sebesar 10,59%, tumbuh menjadi sebesar 14,13% pada tahun 2016, dan mengalami pertumbuhan lagi sebesar 20,37%. Kemudian turun di tahun 2018 menjadi 0,73% dan turun lagi sebesar (7,72%) di tahun 2019. Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Berawal dari tahun 2014 sebesar Rp 450.433.316.497,58, dan mengalami kenaikan pada tahun 2015

menjadi Rp 508.287.656.243,18. Kemudian naik kembali tahun 2016 sebesar Rp 557.181.221.083,17, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 514.582.412.676,00. Naik kembali pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 542.398.350.143,62, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi Rp 538.197.528.799,71.

Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya, dan Belanja Aset Lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Total Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2015, 2017, dan 2019 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2015 tumbuh 12,84% dan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,62% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar (7,65%) yang terendah dibandingkan pertumbuhan tahun yang lain. Tahun 2018 naik sebesar 5,41% dan turun kembali menjadi (0,77%) di tahun 2019. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,89%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal juga mengalami kenaikan dan penurunan, dari turun sebesar (3,11%) pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 28,31% pada tahun 2016. Turun kembali sebesar (9,44%) pada tahun 2017 dan naik kembali 10,42% pada tahun 2018. Dan turun lagi di tahun 2019 menjadi (24,47%), sehingga rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,34%.

Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan Modal bisa dikatakan buruk, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Operasi yang rata-rata mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari proporsi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Modal. Apabila pemerintah daerah berani mengurangi Belanja Operasinya untuk dialokasikan ke Belanja Modal maka dapat dikatakan Pemerintah Daerah tersebut mengutamakan pembangunan di daerahnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi bergantung dengan pemerintah pusat.
2. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut.
3. Dan untuk rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya.
4. Untuk rasio keserasian dikatakan buruk karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil, dana pemerintah daerah yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

5. Dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Kota Tebing Tinggi lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kota Tebing Tinggi mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kota Tebing Tinggi mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah

pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kota yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 6 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kota saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2).
- D., C., & Sumual, L. K. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 782–791.
- Elizar Sinambela, F. S. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Elly Susanti, K. R. (2017). Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Ekonomi - Akuntansi*.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ebbank*, 8(1), 33–48.
- Indrayani, K. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).
- Juddy Julian Pilat, J. M. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1), 45–56.
- Mentari Yosephen Sijabat, C. S. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(2), 236–242.
- Mertyani Sari Dewi, N. A. (2015). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Mimba, D. N. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Muliani, R. (2018). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa

Tahun Anggaran 2012-2016. *Tesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

- Mus'id, M. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 222–241.
- Novita Sari, B. R. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal Of Economic, Business And Accounting (4) 1*.
- Pohan, E. S. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 16(1).
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(13).
- Putri Kemala Dewi Lubis, N. H. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. *Kitabah*, 1(1).
- Putri, I. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 1(1), 57–78.
- Sedana, N. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud (7)2*, 1080-1110.
- Sri Suranta, B. H. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Utomo, D. P. (2017). Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. *Jurnal Education*, 6(2), 57–80.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Ilda Azilla Siregar
Tempat/tanggal lahir : Komplek PT BPP Sungai Aur, 19 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : PT BPP Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat
Program Studi : Akuntansi

2. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Akbar Ismael Siregar
Nama Ibu : Syafrida Hanum Harahap

3. Jenjang Pendidikan
 - SD Bakrie Utama Tamat Tahun 2010
 - SMP NEGERI 1 Sungai Aur Tamat Tahun 2013
 - SMA NEGERI 1 Lembah Melintang Tamat Tahun 2016
 - Tercatat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai sekarang.

Medan, 26 November 2020

Hormat Saya



ILDA AZILLA SIREGAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ilda Azilla Siregar
NPM : 1605170378
Dosen Pembimbing : Fitriani Saragih, SE, M.Si

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Rasio Keuangan
Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Di latar belakang tambahkan teori yang mendukung masalah.	12 Mei 2020	
	Tidak perlu memakai batasan masalah.	12 Mei 2020	
	Ceritakan gambaran objek penelitian.	2 Juli 2020	
	Tambah identifikasi masalahnya.	2 Juli 2020	
Bab 2	Perbaiki kerangka konseptual.	2 Juli 2020	
Bab 3	Teknik pengambilan sampel ganti menjadi jenis data.	2 Juli 2020	
	Teknik pengambilan data primer ubah menjadi data sekunder.	2 Juli 2020	
Daftar Pustaka	Sesuaikan dengan mandeley.	2 Juli 2020	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc seminar proposal	15 Juli 2020	

Medan, 17 November 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1300/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/12/2019

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 13/12/2019

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ilda Azilla Siregar
NPM : 1605170378
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Masih banyak instansi pemerintahan yang tidak jujur dalam pengelolaan pendapatan daerah dan boros dalam penggunaan dana belanja daerah.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia masih buruk dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan benar.
3. Tidak meratanya pembagian raskin kepada rumah tangga miskin yang terdaftar dalam penerima raskin.

Rencana Judul : 1. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan
2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Pengelolaan Program Raskin Ditinjau dari Value For Money untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Objek/Lokasi Penelitian : Pemerintahan Kota Tebing Tinggi

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon

(Ilda Azilla Siregar)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1300/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/12/2019

Nama Mahasiswa : Iida Azilla Siregar

NPM : 1605170378

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Sektor Publik

Tanggal Pengajuan Judul : 13/12/2019

Nama Dosen pembimbing*)

Fitriani Saragih, SE, M.Si 16/12/2019

Judul Disetujui**)

Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai
Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah
Kota Tebing Tinggi

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Keterangan:

*) Ditai oleh Pimpinan Program Studi

***) Ditai oleh Dosen Pembimbing

Setelah ditai oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lambaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 2055/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ilda Azilla Siregar
N P M : 1605170378
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Dosen Pembimbing : **Fitriani Saragih, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan ” **BATAL** ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **11 Juli 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 19 Dzul qa'dah 1441 H
11 Juli 2020 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
... 11 Februari ... 2020 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I L D A A Z I L L A S I R E G A R

NPM : 1 6 0 9 1 7 0 3 7 8

Tempat, Tgl. Lahir : K O M P P T B P P S E I A U R
1 0 M A R E T 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : S A K U R A P E R M A I S A K U R
3 T J S E L A M A T

Tempat Penelitian : K A N T O R W A L I K O T A
T E B I N G T I N G G I

Alamat Penelitian : J L D r S U T O M U R A M B U N G
K E C T E B I N G T I N G G I

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


12/2/20
(FITRIANI SARAGIH S.E, M.S)

Wassalam
Pemohon


(ILDA AZILLA SIREGAR)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 687/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 17 Jum. Akhir 1441 H
11 Februari 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Walikota Tebing Tinggi
Jln. Dr. Sutomo, Rambung, Kec. Tebing Tinggi
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ilda Azilla Siregar
Npm : 1605170378
Program Studi : Akuntansi
Semeste : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan 

H. Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Pertinggal

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi EP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Gunung Agung – Tebing Tinggi 20615
Telepon ☎ 0621 – 325515 No. Fax. 0621 – 325342

R E K O M E N D A S I

Nomor : 070/ *209* /BKBPPM/2020

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 687/II.3-AU/UMSU-05/F/2020, Tanggal 11 Februari 2020, Perihal Izin Riset Pendahuluan atas nama:

Nama : **ILDA AZILLA SIREGAR**
NIM : 1605170378
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : **“ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI”**
Waktu Penelitian : 25 Februari 2020 s/d 23 Maret 2020
Lokasi Penelitian : BPKPAD Kota Tebing Tinggi
Penanggung Jawab : H.Januri, SE, MM, M.Si

2. Menindaklanjuti maksud surat tersebut, bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas penelitian dimaksud, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku tentang penelitian;
 - b. Menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Tidak dibenarkan mengadakan penelitian diluar judul yang diajukan;
 - d. Tidak dibenarkan membuat pertanyaan dan pernyataan yang dapat menyinggung perasaan dan menimbulkan Konflik Sosial;
 - e. Melaporkan segala hasil penelitian kepada Pemko Tebing Tinggi Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Tebing Tinggi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai penelitian.
3. Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : *24* Februari 2020

**KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
KOTA TEBING TINGGI**



[Signature]
AMAS MUDA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620921 199111 1 001

Tembusan :

- 1 Yth. Walikota Tebing Tinggi (sebagai Laporan)
- 2 BPKPAD Kota Tebing Tinggi



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**Jl. Gunung Agung Telp. (0621) 23837 Fax. (0621) 23837
Email : bkpad@tebingtinggikota.go.id**

Tebing Tinggi, 3 Maret 2020

Nomor : 800 / 1001 / BPKPAD / 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhamadiyah Sumut

di -
Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor :070/209/BKBPPM/2020, Tanggal 24 Februari 2020 tentang Rekomendasi Mengadakan Penelitian di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan untuk melaksanakan kegiatan Riset a.n ILDA AZILLA SIREGAR dengan NIM : 1605170378 kami terima dengan ketentuan dapat mematuhi tata tertib dan peraturan yang ada.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIS


SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP
PEMBINA TK. I
NIP. 19730719 199311 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 3499/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 20 Rabiul Awal 1442 H
06 November 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Wali Kota Tebing Tinggi
Jln. Dr. Sutomo, Rambung, Kec. Tebing Tinggi
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Ilda Azilla Siregar
N P M : 1605170378
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. Gunung Agung Telp. (0621) 23837 Fax. (0621) 23837
Email : bpkpadkotatebingtinggi@yahoo.com

Tebing Tinggi, 6 November 2020

Nomor : Kepada,
Sifat : Biasa Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lampiran : - Universitas Muhammadiyah Sumatera
Perihal : Menyelesaikan Riset Utara
di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 687/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 11 Pebruari 2020 perihal Izin Riset Pendahuluan dan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Nomor : 070/209/BKBPPM/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 perihal Izin Riset Pendahuluan dapat kami sampaikan bahwa Mahasiswa Saudari :

Nama : Ilda Azilla Siregar
NIM : 1605170378
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : "ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI"

Waktu Penelitian : 25 Pebruari 2020 s/d 23 Maret 2020

Lokasi penelitian : BPKPAD Kota Tebing Tinggi

telah menyelesaikan riset pendahuluan dan selanjutnya berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3499/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Menyelesaikan Riset yang bersangkutan juga telah menyelesaikan riset akhir pada tanggal 6 November 2020.

Demikian disampaikan kepada Saudara, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

JEFFRI SEMBIRING, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610623 199203 1 003

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

R.	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	6
		3	4		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	625.779.796.283,00	628.621.517.914,97	2.841.721.631,97	100,45
	Hasil Pajak Daerah	65.945.890.342,00	74.515.273.851,97	8.569.383.509,97	112,99
	Hasil Retribusi Daerah	14.790.000.000,00	19.752.464.279,90	4.962.464.279,90	133,55
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.480.618.886,00	5.942.153.764,11	461.534.878,11	108,42
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.434.572.456,00	6.434.572.456,00	0,00	100,00
	DANA PERIMBANGAN	39.240.699.000,00	42.386.083.351,96	3.145.384.351,96	108,02
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	430.172.186.000,00	436.868.476.540,00	6.696.290.540,00	101,56
	Dana Alokasi Umum	8.910.033.000,00	15.606.323.540,00	6.696.290.540,00	175,15
	Dana Alokasi Khusus	385.030.433.000,00	385.030.433.000,00	0,00	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.231.720.000,00	36.231.720.000,00	0,00	100,00
	Pendapatan Hibah	129.661.719.941,00	117.237.767.523,00	(12.423.952.418,00)	90,42
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.889.035.941,00	23.034.454.523,00	(3.854.581.418,00)	85,66
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68.632.763.000,00	68.632.763.000,00	0,00	100,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	29.139.921.000,00	25.570.550.000,00	(3.569.371.000,00)	87,75
	BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	682.308.356.591,00	614.015.440.542,58	(68.292.916.048,42)	89,99
	Belanja Pegawai	323.611.443.239,00	290.198.557.297,00	(33.412.885.942,00)	89,67
	Belanja Hibah	316.529.144.738,00	283.621.553.795,00	(32.907.590.943,00)	89,60
	Belanja Bantuan Sosial	5.741.650.000,00	5.512.750.000,00	(228.900.000,00)	96,01
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	628.050.000,00	409.750.000,00	(218.300.000,00)	65,24
	Belanja Tidak Terduga	712.598.501,00	654.503.502,00	(58.094.999,00)	91,85
	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pegawai	358.696.913.352,00	323.816.883.245,58	(34.880.030.106,42)	90,28
	Belanja Barang dan Jasa	10.064.758.000,00	9.160.080.700,00	(904.677.300,00)	91,01
	Belanja Modal	171.646.649.452,00	151.074.678.500,58	(20.571.970.951,42)	88,01
	Belanja Modal	176.985.505.900,00	163.582.124.045,00	(13.403.381.855,00)	92,43

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	3	4	5	6
SURPLUS / (DEFISIT)				
	(56.528.560.308,00)	14.606.077.372,39	71.134.637.680,39	(25,84)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERTIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64.028.560.309,33	64.028.560.309,33	1,33	100,00
Penerimaan Piutang Daerah	64.025.678.209,00	64.025.678.209,33	1,33	100,00
	2.882.100,00	2.882.100,00	0,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN				
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
	0,00	(71.134.637.681,72)	(71.134.637.681,72)	0,00
	0,00	(71.134.637.681,72)	(71.134.637.681,72)	0,00
PEMBIAYAAN NETTO				
	56.528.560.308,00	56.528.560.309,33	1,33	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
	0,00	71.134.637.681,72	71.134.637.681,72	0,00

Tebing Tinggi, 19 Oktober 2015
Walikota

ttd

Umar Zunaidi Hasibuan



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	6
	3	4	5		
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)		
PENDAPATAN	685.603.027.096,00	667.061.086.952,21	(18.541.940.143,79)	97,30	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.551.848.210,00	82.410.053.810,21	2.858.205.600,21	103,59	
Pendapatan Pajak Daerah	16.463.000.000,00	20.643.514.038,50	4.180.514.038,50	125,39	
Hasil Retribusi Daerah	4.406.770.000,00	3.960.226.741,90	(446.543.258,10)	89,87	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.791.115.210,00	10.811.176.874,00	20.061.664,00	100,19	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.890.963.000,00	46.995.136.155,81	(895.826.844,19)	98,13	
DANA PERIMBANGAN	467.616.892.613,00	462.561.984.813,00	(5.054.907.800,00)	98,92	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.587.118.613,00	13.895.480.813,00	(4.691.637.800,00)	74,76	
Dana Alokasi Umum	400.236.724.000,00	400.236.724.000,00	0,00	100,00	
Dana Alokasi Khusus	48.793.050.000,00	48.429.780.000,00	(363.270.000,00)	99,26	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	138.434.286.273,00	122.089.048.329,00	(16.345.237.944,00)	88,19	
Pendapatan Hibah	15.581.515.000,00	13.981.515.000,00	(1.600.000.000,00)	89,73	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.792.225.299,00	30.792.225.299,00	0,00	100,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	66.340.073.000,00	53.227.298.000,00	(13.112.775.000,00)	80,23	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.720.472.974,00	24.088.010.030,00	(1.632.462.944,00)	93,65	
BELANJA	756.330.659.797,00	666.789.251.487,93	(89.541.408.309,07)	88,16	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	354.623.172.922,00	316.302.879.327,00	(38.320.293.595,00)	89,19	
Belanja Pegawai	346.331.796.422,00	309.140.898.873,00	(37.190.897.549,00)	89,26	
Belanja Hibah	5.982.780.000,00	5.847.371.960,00	(135.408.040,00)	97,74	
Belanja Bantuan Sosial	900.000.000,00	520.100.000,00	(379.900.000,00)	57,79	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	908.596.500,00	780.155.250,00	(128.441.250,00)	85,86	
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	14.353.244,00	(485.646.756,00)	2,87	
BELANJA LANGSUNG	401.707.486.875,00	350.486.372.160,93	(51.221.114.714,07)	87,25	
Belanja Pegawai	11.122.441.075,00	9.629.224.000,00	(1.493.217.075,00)	86,57	
Belanja Barang dan Jasa	200.541.925.180,00	182.369.906.160,18	(18.172.019.019,82)	90,94	
Belanja Modal	190.043.120.620,00	158.487.242.000,75	(31.555.878.619,25)	83,40	

KODIR KURIR	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)				
		(70.727.632.701,00)	271.835.464,28	70.999.468.165,28	(0,38)
	PEMBIAYAAN DAERAH				
.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.134.637.680,39	71.143.082.781,72	8.445.101,33	100,01
.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	71.134.637.680,39	71.134.637.681,72	1,33	100,00
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	8.445.100,00	8.445.100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	71.134.637.680,39	71.143.082.781,72	8.445.101,33	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENDARAAN	407.004.979,39	71.414.918.246,00	71.007.913.266,61	17,546,45

PJ. WALKOTA TEBING TINGGI,

ttd

ZULKARNAIN



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	736.984.324.320,00	707.957.368.508,40	(29.026.955.811,60)	96,06
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	96.675.127.242,00	94.058.491.717,40	(2.616.635.524,60)	97,29
1	Pendapatan Pajak Daerah	21.054.000.000,00	22.347.674.951,50	1.293.674.951,50	106,14
2	Hasil Retribusi Daerah	4.510.778.000,00	4.096.558.952,73	(414.219.047,27)	90,82
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.912.063.042,00	14.431.785.876,00	519.722.834,00	103,74
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.198.286.200,00	53.182.471.937,17	(4.015.814.262,83)	92,98
	DANA PERIMBANGAN	587.462.223.000,00	557.996.175.287,00	(29.466.047.713,00)	94,98
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dana Transfer Umum	432.203.601.000,00	432.437.231.464,00	233.630.464,00	100,05
6	Dana Transfer Khusus	155.258.622.000,00	125.558.943.823,00	(29.699.678.177,00)	80,87
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.846.974.078,00	55.902.701.504,00	3.055.727.426,00	105,78
1	Pendapatan Hibah	1.974.000.000,00	1.974.000.000,00	0,00	100,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.344.771.068,00	42.924.621.494,00	3.579.850.426,00	109,10
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.528.203.010,00	11.004.080.010,00	(524.123.000,00)	95,45
	BELANJA	803.579.519.732,00	760.702.935.123,17	(42.876.584.608,83)	94,66
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	359.987.866.886,00	345.647.149.563,00	(14.340.717.323,00)	96,02
	Belanja Pegawai	337.524.557.873,00	324.399.860.680,00	(13.124.697.193,00)	96,11
	Belanja Hibah	20.240.895.000,00	20.240.895.000,00	0,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	908.596.500,00	839.942.250,00	(68.654.250,00)	92,44
	Belanja Tidak Terduga	1.313.817.513,00	166.451.633,00	(1.147.365.880,00)	12,67
	BELANJA LANGSUNG	443.591.652.846,00	415.055.785.560,17	(28.535.867.285,83)	93,57
	Belanja Pegawai	12.379.566.000,00	10.765.000.800,00	(1.614.565.200,00)	86,96
	Belanja Barang dan Jasa	219.495.005.424,00	200.935.522.353,17	(18.559.483.070,83)	91,54

BERTAMBAH / (BERKURANG) = RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BERSAMA DENGAN TABEL DAFTAR

KODIRUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3	Belanja Modal	211.717.081.422,00	203.355.262.407,00	(8.361.819.015,00)	96,05
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.595.195.412,00)	(52.745.566.614,77)	13.849.628.797,23	79,20
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.414.918.246,00	71.434.253.646,00	19.335.400,00	100,01
6	Penerimaan Piutang Daerah	71.406.473.146,00	71.414.918.246,00	8.445.100,00	100,01
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.819.722.834,00	4.819.722.834,00	0,00	100,00
		4.819.722.834,00	4.819.722.834,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	66.595.195.412,00	66.614.530.812,00	19.335.400,00	100,01
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAAN	0,00	13.868.964.197,23	13.868.964.197,23	0,00

Tebing Tinggi, 10 Agustus 2017
WALIKOTA TEBING TINGGI,

tttd

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	6
	3	4		
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	728.893.893.343,94	711.630.069.618,17	(17.263.883.725,77)	97,63
Pendapatan Pajak Daerah	121.948.410.113,00	113.222.874.687,17	(8.325.535.425,83)	93,15
Hasil Retribusi Daerah	25.685.000.000,00	27.157.730.359,00	1.467.730.359,00	105,71
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipsihkan	4.180.750.000,00	3.351.513.449,12	(829.236.550,88)	80,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.425.176.309,00	8.257.483.913,00	(75.167.692.396,00)	10,00
DANA PERIMBANGAN	575.163.028.104,94	566.917.829.684,00	(8.245.198.420,94)	98,57
Dana Transfer Umum	424.046.794.104,94	423.310.733.452,00	(736.060.652,94)	99,83
Dana Transfer Khusus	151.116.294.000,00	143.607.096.232,00	(7.509.197.768,00)	95,03
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.182.455.126,00	31.498.305.247,00	(684.149.879,00)	97,86
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.182.455.126,00	31.498.305.247,00	(684.149.879,00)	97,86
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	742.762.857.541,00	699.043.052.154,00	(43.719.805.387,00)	94,11
Belanja Pegawai	296.616.934.615,00	295.831.657.947,00	(785.276.668,00)	96,36
Belanja Hibah	277.494.615.766,00	267.703.596.578,00	(9.791.020.188,00)	96,47
Belanja Bantuan Sosial	8.570.651.149,00	7.971.987.869,00	(598.663.280,00)	93,01
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	8.943.000.000,00	8.943.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	1.298.596.500,00	908.596.500,00	(390.000.000,00)	69,97
BELANJA LANGSUNG	310.070.200,00	304.477.000,00	(5.593.200,00)	98,20
Belanja Pegawai	446.145.922.926,00	413.211.394.207,00	(32.934.528.719,00)	92,62
Belanja Barang dan Jasa	16.973.878.800,00	15.203.233.150,00	(1.770.645.650,00)	89,57
Belanja Modal	237.670.116.191,00	213.851.998.579,00	(23.818.117.612,00)	89,98
	191.501.927.935,00	184.156.162.478,00	(7.345.765.457,00)	96,16
SURPLUS / (DEFISIT)	(13.868.964.197,06)	12.586.957.464,17	26.455.921.661,23	(90,76)

MOR KUT	URAIAN 2	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3	REALISASI 4	(Rp) 5	(%) 6
	PEMBIAYAAN DAERAH				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13.868.964.197,06	13.868.964.197,23		0,17
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	13.868.964.197,06	13.868.964.197,23		0,17
		0,00	26.455.921.661,40	26.455.921.661,40	0,00

Tebing Tinggi, 30 Agustus 2018
WALI KOTA TEBING TINGGI,

tttd

Sesuai sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SITI MASITA SARAGIH

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / (BERKURANG)	
	3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	704.172.428.178,00	717.784.276.096,71	13.611.847.918,71	101,93
Pendapatan Pajak Daerah	105.579.950.493,00	114.048.354.142,71	8.468.403.649,71	108,02
Hasil Retribusi Daerah	24.226.942.493,00	30.084.477.379,99	5.857.534.886,99	124,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.758.000.000,00	3.580.089.648,11	(1.177.910.351,89)	75,24
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.500.000.000,00	13.598.925.485,00	98.925.485,00	100,73
DANA PERIMBANGAN	63.095.008.000,00	66.784.861.629,61	3.689.853.629,61	105,88
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	547.815.047.000,00	540.901.919.396,00	(6.913.127.604,00)	98,74
Dana Transfer Umum	0,00	214.866.400,00	214.866.400,00	0,00
Dana Transfer Khusus	427.268.868.000,00	425.818.191.832,00	(1.450.673.168,00)	99,66
	120.546.179.000,00	114.868.858.164,00	(5.677.320.836,00)	95,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.777.430.685,00	62.834.002.558,00	12.056.571.873,00	123,74
Pendapatan Hibah	19.605.590.500,00	20.289.061.518,00	683.471.018,00	103,49
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.171.840.185,00	25.502.579.570,00	(5.669.260.615,00)	81,81
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	17.042.361.430,00	17.042.361.430,00	0,00
BELANJA	790.416.665.396,00	746.857.086.076,33	(43.559.579.319,67)	94,49
BELANJA TIDAK LANGSUNG	310.517.875.393,00	283.929.247.856,00	(26.588.627.507,00)	91,44
Belanja Pegawai	293.759.050.310,00	270.133.266.186,00	(23.625.784.124,00)	91,96
Belanja Bunga	1.536.864.583,00	201.515.000,00	(1.335.349.583,00)	13,11
Belanja Hibah	8.253.364.000,00	7.443.300.000,00	(810.064.000,00)	90,13
Belanja Bantuan Sosial	5.460.000.000,00	5.032.500.000,00	(427.500.000,00)	92,17
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	908.596.500,00	908.596.500,00	0,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	210.070.200,00	(389.929.800,00)	35,01
BELANJA LANGSUNG	179.898.790.003,00	462.927.838.190,33	(16.970.951.812,67)	96,46
Belanja Pegawai	16.487.595.000,00	14.869.869.900,00	(1.617.729.100,00)	90,19
Belanja Barang dan Jasa	258.494.430.295,00	244.717.899.057,62	(13.776.531.237,38)	94,67
Belanja Modal	204.916.750.708,00	203.340.069.232,71	(1.576.691.475,29)	99,23

KODERURUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		(Rp)	(%)
1	2	3	4		5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.244.237.218,00)	(29.072.809.379,62)		57.171.427.238,38	33,71
	PEMBIAYAAN DAERAH					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya	94.477.769.443,00	65.529.140.025,40		(28.948.629.417,60)	69,36
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	53.877.769.443,00	26.226.140.025,40		(27.651.629.417,60)	48,68
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.816.865.557,00	4.816.865.557,00		(3.416.666.668,00)	58,50
3	Pembayaran Pokok Utang	3.416.865.557,00	0,00		(3.416.666.668,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.244.237.218,00	60.712.274.468,40		(25.531.962.749,60)	70,40
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	31.639.464.488,78		31.639.464.488,78	0,00

Tebing Tinggi, 29 Juli 2019
WALIKOTA TEBING TINGGI,

td

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN



1 NOMOR URUT	2 URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	
1	PENDAPATAN	747.554.036.091,79	713.313.296.387,52	(34.240.739.704,27)	95,42	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	119.116.990.780,10	105.239.918.351,52	(13.877.072.428,58)	88,35	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30.640.000.000,00	32.930.507.267,00	2.290.507.267,00	107,48	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	5.660.100.000,00	4.507.112.962,00	(1.152.987.038,00)	79,63	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.709.888.037,00	16.709.888.037,00	0,00	100,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.107.002.743,10	51.092.410.085,52	(15.014.592.657,58)	77,29	
1.1.2	DANA PERIMBANGAN	561.525.186.655,00	547.285.111.940,00	(14.240.074.715,00)	97,46	
1.1.2.5	Dana Transfer Umum	449.852.466.000,00	444.388.765.392,00	(5.463.710.608,00)	98,79	
1.1.2.6	Dana Transfer Khusus	111.672.720.655,00	102.896.356.548,00	(8.776.364.107,00)	92,14	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.911.858.656,69	60.788.266.096,00	(6.123.592.560,69)	90,85	
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.303.200.000,00	19.564.340.830,00	(738.859.170,00)	96,36	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.608.658.656,69	41.223.925.266,00	(5.384.733.390,69)	88,45	
2	BELANJA	764.643.608.228,88	691.772.850.871,40	(72.870.757.357,48)	90,47	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	304.538.576.534,25	287.964.253.104,00	(16.574.322.430,25)	94,56	
2.1.1	Belanja Pegawai	289.101.882.386,00	273.952.554.687,00	(15.149.327.699,00)	94,76	
2.1.1.2	Belanja Bunga	2.881.401.192,00	2.881.401.192,00	0,00	100,00	
2.1.1.4	Belanja Hibah	7.427.600.000,00	6.535.475.600,00	(892.124.400,00)	87,99	
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.814.500.000,00	3.760.016.500,00	(54.483.500,00)	98,57	
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	921.629.756,25	834.805.125,00	(86.824.631,25)	90,58	
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	391.562.200,00	0,00	(391.562.200,00)	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	460.105.032.694,63	403.808.597.767,40	(56.296.434.927,23)	87,76	
2.2.1	Belanja Pegawai	14.519.388.187,00	12.869.255.780,00	(1.650.132.407,00)	88,63	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.074.123.917,63	237.362.019.915,71	(41.712.104.001,92)	85,05	
2.2.3	Belanja Modal	166.511.520.590,00	153.577.322.071,69	(12.934.198.518,31)	92,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.089.572.137,09)	21.540.445.516,12	38.630.017.653,21	(126,04)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.639.464.488,78	31.596.840.087,88	(42.624.400,90)	99,87
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	21.182.670.303,00	21.182.670.303,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	9.391.770.303,00	9.391.770.303,00	0,00	100,00
		11.790.900.000,00	11.790.900.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO				
		10.456.794.185,78	10.414.169.784,88	(42.624.400,90)	99,59
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				
		(6.632.777.951,31)	31.954.615.301,00	38.587.393.252,31	(481,77)

Tebing Tinggi, 12 August 2020
WALI KOTA TEBING TINGGI,

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN